

- J A T E O L O G I d a n G E R E J A**
- Tantangan terhadap Penghayatan Agama Dewasa ini dan Alternatifnya di Masa Depan.**
Musuh Agama bukan Sesama Agama, tetapi Syaitan-syaitan
Eka Darmaputera
- Mengais Hikmah di antara Puing Gereja**
Ariel Heryanto
- Gereja-Bagi-Orang-Lain**
Suatu Refleksi tentang Menggereja dalam Konteks Penderitaan, Kemajemukan dan Warisan Sejarah
A.A. Yewangoe
- Hidup Menggereja Baru yang Dapat Dipertanggungjawabkan**
Lima Agenda Mendesak
J.B. Banawiratma
- Iman Kristiani Iman Yang Terbuka**
Menuju Spiritualitas Dialogis dalam Konteks Pluralisme Sejagat
Trisno S. Sutanto
- Citizenship Ethics and Classical Virtue Theory**
A Test Case for A Hermeneutical Method
Frances Screnock
- Wawasan Kebangsaan dan Kebebasan Beragama**
Upaya Memahami Masa Depan Indonesia sebagai Satu Kesatuan Nasib
Th. Sumartana
- Agama dan Negara: Aspek Spiritual, Moral dan Etik dalam GBHN 1993. Suatu Telaah Kritis Hubungan Agama-Negara dalam Perspektif Negara Pancasila**
Eka Darmaputera
- Rumah Panjang sebagai Model Bergereja dalam Konteks Masyarakat Dayak Kalimantan yang Teralienasi**
Marco Mahin
- Eksklusivisme Yohanes 14:6 – Apakah Suatu Penghalang bagi Bergereja Yang Terbuka pada Banyak Jalan Agung?**
Ioanes Rakhmat

MENGAIS HIKMAH DI ANTARA PUING GEREJA

Ariel Heryanto

Tenaga pengajar di The National University of Singapore

Southeast Asian Studies Programme

10 Kent Ridge Crescent, Singapore 119260

Membicarakan gereja dan umat Kristiani dalam konteks Indonesia di masa ini hampir-hampir tak mungkin dilakukan tanpa mengacu pada sejumlah kerusakan yang telah menyatroni puluhan gereja di tanah air. Sejumlah vihara dan bangunan komersial serta gedung kantor pemerintahan ikut menjadi korban. Tetapi pembahasan berikut ini hanya terbatas pada penyerangan terhadap gereja, walau signifikansi persoalan ada yang relevan untuk memahami sebagian kasus serangan terhadap bangunan-bangunan non-gereja.

Menutup mata atau membisu terhadap serangkaian kekerasan massal itu bukan saja bisa mengecewakan banyak pihak yang berkepentingan dengan kehadiran gereja di tanah air. Tindakan seperti itu malahan bisa menimbulkan tafsiran dan kecurigaan yang bukan-bukan. Tapi ada kesulitan substantif, bukan sekedar teknis, untuk membicarakan hal itu. Bukan sekedar karena ada tabu SARA. Tabu-tabu semacam itu boleh dianggap sebagai hambatan teknis. Hambatan yang lebih serius adalah ini: hampir sebagian besar orang percaya bahwa rangkaian kekerasan terhadap gereja dan sejumlah bangunan lain yang mengguncang politik Indonesia dalam beberapa tahun belakangan “sesungguhnya tidak dimaksudkan” sebagai tindakan anti-Kristen.

Mungkin tidak semua orang sepakat dengan pandangan itu. Namun sebatas catatan yang saya kumpulkan, sebagian besar lembaga resmi perwakilan umat Kristiani dan pengamat individual menyatakan pandangan semacam itu. Berbagai pengerusakan dan pembakaran gereja tersebut dapat diibaratkan sebagai tembakan peringatan ke udara. Sebuah pernyataan komunikasi yang berisi pesan politik. Sasaran utama pesan itu bukanlah umat Nasrani. Gereja telah dibakar sekedar sebagai alat-komunikasi, seperti senapan dan pelor dalam tembakan ke udara.

Masalahnya bukanlah pandangan semacam itu keliru. Saya sendiri termasuk orang yang mempercayai pandangan semacam itu. Masalahnya dapat dirangkai dari beberapa pertanyaan sebagai berikut. Kalau serangan itu memang tidak dimaksud-

kan sebagai permusuhan kepada umat Kristen, lalu kepada siapa kebencian itu ditujukan, dan apa tanggapan umat Kristiani terhadap persoalan itu? Kalau serangan itu memang tidak dimaksudkan sebagai permusuhan terhadap umat Kristen, apakah dengan demikian tidak ada yang perlu dibahas orang Kristen sebagai korban langsung sejumlah kerusuhan itu -- apakah orang Kristen sebaiknya mengambil posisi sebagai pihak yang malang nasibnya karena kena peluru nyasar? Kalau orang Kristen masih ingin membahasnya tanpa menjadi dendam emosional sebagai pihak yang paling langsung diserang, apa yang dapat atau perlu dibahasnya? Kalau benar gereja bukan menjadi sasaran utama kaum perusuh, tapi sekedar sasaran perantara, mengapa gereja berkali-kali dipilih dengan sengaja sebagai pemegang peran perantara itu -- mengapa tidak yang lain? Apakah hikmah, kalau ada, yang dapat dipetik dari serangkaian peristiwa yang memprihatinkan itu?

Siapa Serang Siapa?

Kesulitan mengidentifikasi siapa selain gereja, vihara dan sejumlah lain yang sebenarnya diserang perusuh berkait erat dengan kesulitan mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menjadi penyerang alias pelaku kerusuhan dan sponsornya. Jika kita perhatikan ucapan sejumlah pejabat tentang peristiwa itu, kita tidak mendapatkan pemahaman yang memadai. Karena itu kita tidak dapat menyetujui atau menolaknya. Berkali-kali kita dengar ada pejabat yang mempersoalkan adanya “aktor intelektual” di balik sejumlah kerusuhan itu, tanpa pernah menyebutkan nama dan alamat orang itu.

Untuk sementara waktu, tuduhan tidak jelas itu dapat menyulitkan komunitas Islam. Karena yang menjadi korban kerusuhan adalah komunitas agama minoritas (non-Islam), maka seakan-akan wajarlah bila yang paling pantas dicurigai adalah komunitas agama mayoritas, yakni Islam. Mereka yang termakan logika semacam ini akan sibuk berbicara tentang kerukunan beragama. Seakan-akan kerusuhan itu bertema kerusuhan antar-agama. Sebagian besar media asing ikut-ikutan merisaukan masyarakat internasional, khususnya yang bermayoritas penduduk Nasrani, dengan ulasan-ulasan seperti itu. Sejak awal kenaifan ulasan semacam itu sangat mencurigakan. Disengaja atau pun tidak, uraian semacam itu melakukan dua gebrakan sekaligus: mendiskreditkan komunitas Islam dan mengintimidasi komunitas Nasrani. Tentu saja ada pihak ketiga (bukan komunitas keagamaan) yang secara potensial dapat diuntungkan bila perpecahan dan saling curiga antar-komunitas agama itu terjadi.

Jika pernyataan pejabat tentang “aktor intelektual” yang serba samar itu hanya diulang-ulang terus-menerus, eksesnya akan membuahkan dua kesan lain. Pertama, kita mendapat kesan sebenarnya orang yang disebut-sebut “aktor intelektual” atau “dalang” itu memang tidak pernah ada sehingga tidak dapat ditangkap, difoto, atau diadili. Kemungkinan kedua, orang itu mungkin ada, tetapi ia atau mereka jauh lebih cerdik atau lebih berkuasa daripada pejabat yang menyebut profilnya secara samar-samar saja. Pejabat itu tidak mampu atau tidak berani menangkapnya sesuai hukum. Bahkan kita bisa mendapat kesan, jangan-jangan pejabat itu punya cukup informasi tetapi tak punya cukup nyali untuk menyebutkan identitas aktor intelektual itu secara lebih blak-blakan.

Sementara itu – dalam gelombang gossip dan bursa percakapan yang simpang-siur – sebagian besar media dan komentator melaporkan dan membahas berbagai kerusuhan itu dengan menuduh seakan-akan rakyat jelata di tempat kejadian itu menjadi pelaku kerusuhan. Tuduhan itu tidak selalu disampaikan dengan niat jahat dan menghukum. Seringkali niatnya justru membela mereka. Pembelaan itu diajukan, misalnya, dengan mengemukakan adanya kesenjangan sosial-ekonomi. Seakan-akan kesenjangan sosial-ekonomi secara langsung dan alamiah dapat memmmberikan pembenaran yang rasional mengapa gereja diserang dan dibakar. Ironisnya, secara tidak langsung pembelaan itu justru menguatkan tuduhan terhadap penduduk miskin di lokasi itu yang kemungkinan besar tidak tahu-menahu tentang kerusuhan di kotanya. Sedang gereja dianggap sebagai lambang kemewahan kaum berhartanya yang pantas dihukum.

Pandangan semacam itu tidak meyakinkan, biar pun kesenjangan sosial ekonomi memang merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dibantah, biar pun memang ada beberapa gereja mewah dengan pengunjung naik mobil serba *wah*. Tuduhan terhadap penduduk yang miskin di lokasi kejadian lebih mengganggu nurani. Selintas-pintas beberapa laporan jurnalis sudah menyanggah dengan menyebutkan bahwa penduduk di lokasi kerusuhan seringkali merasa terheran-heran dengan kerusuhan yang melanda kota mereka. Penduduk lokal juga mengatakan bahwa para perusuh adalah orang-orang dari luar kota yang berlogat asing.

Walau sampai saat ini belum tersedia bukti-bukti yang cukup untuk disusun menjadi sebuah tuduhan yang rapi, setidaknya kondisi realitas sosial Indonesia saat ini dapat memberikan alasan kuat untuk menduga (dari antara sekian dugaan lain) bahwa kalangan aparaturnya negara (atau oknum-oknumnya) sebagai pihak yang ikut bertanggung-jawab atas rangkaian kerusuhan belakangan. Saat ini negara merupakan satu-satunya lembaga sosial di tanah air yang punya kekuatan dan sumberdaya yang tidak tertandingi. Kalau mau, oknum-oknum negara paling

berpeluang mensponsori *tour* kerusuhan dengan watak, irama, dan paket yang sangat mirip satu sama lain.

Dugaan terhadap tanggung jawab aparat negara dapat dan telah dirumuskan dalam sejumlah versi, dari yang paling serius hingga yang paling ringan. Yang paling serius adalah tuduhan bahwa pihak pemerintah secara langsung menjadi sponsor dan sekaligus pelaku utama serangkaian kerusuhan itu. Tujuannya melumpuhkan seluruh kekuatan non-negara menjelang pemilu, menyediakan arena untuk menyalurkan frustrasi masyarakat agar tidak ditujukan ke pihak aparaturnya negara seperti yang terjadi di Jakarta (27 Juli 1996). Tuduhan semacam itu, misalnya, beredar dalam beberapa analisa atas kasus Situbondo. Dalam versi yang paling ringan, aparat keamanan dituduh telah dengan sengaja berpangku-tangan membiarkan kerusuhan membara berlangsung berjam-jam. Mereka baru menghampiri tempat kejadian sesudah para perusuh pergi meninggalkan tempat kejadian. Berbagai laporan empirik dari serangkaian kejadian menyebutkan saksi mata tentang hal ini.

Dalam laporannya tentang kerusuhan di Jakarta (27 Juli 1996), Komisi Hak Asasi Manusia yang diangkat Presiden dengan tegas menyatakan bahwa pihak keamanan telah ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan. Jika aparat keamanan dapat berbuat sejauh itu di pusat ibukota Jakarta, di siang hari bolong, disaksikan puluhan wartawan internasional, tidak mustahil mereka melakukan hal yang sama di kota-kota kecil yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan aspirasi politiknya tidak tertuju kepada partai yang berkuasa.

Uraian di atas tidak bermaksud membantah masih adanya masalah di antara komunitas-komunitas agama di Indonesia. Kecurigaan dan ketegangan bisa hadir kapan pun juga di dalam suatu komunitas sendiri atau antara satu komunitas dengan komunitas lain. Tetapi hal-hal itu bisa berlangsung tanpa mengancam keinginan mereka untuk hidup berdampingan. *Sejarah Republik ini berkali-kali menghadapi ancaman perpecahan, tetapi tidak pernah karena perbedaan agama.* Yang patut dipertanyakan dengan kritis di sini adalah apakah saat ini ada masalah yang sedemikian serius di antara komunitas Kristen dan komunitas Islam sehingga meledakkan kerusuhan belakangan ini? Ataukah serangan terhadap komunitas Kristen dengan menggunakan simbol-simbol agama Islam (misalnya teriakan *Allahu Akbar*) merupakan sebuah dekorasi yang ditempelkan pihak ketiga dengan sembarangan pada hubungan antar komunitas-komunitas agama yang sebenarnya hidup berdampingan dengan rukun?

Uraian diatas menekankan pihak ketiga yang datang dari luar kota sebagai pihak yang paling layak dicurigai dalam sejumlah kerusuhan. Ini bukannya berarti tidak ada satu orang pun dikalangan penduduk lokal yang tidak ikut-ikutan terlibat dalam kerusuhan itu. Tidak mustahil sejumlah remaja mula-mula terkejut menyak-

sikan kotanya dibanjiri orang asing yang kemudian menyerang tempat ibadah agama lain. Mereka kemudian tertarik menonton. Karena asyik, lama kelamaan mereka tergoda ikut-ikutan mencoba melakukan tindakan tidak biasa yang ternyata dibiarkan saja oleh aparat keamanan. Keterlibatan anak-anak muda ini dibutuhkan dalam skenario yang profesional. Mereka potensial dipancing untuk ikut-ikutan kemudian ditangkap dan dijadikan tertuduh dalam sidang pengadilan.

Sosok Umat Kristen: Pembentukan Sejarah

Terlepas dari duga-dugaan siapa pelaku kerusuhan dan apa motivasinya, umat Kristen telah dikorbankan dalam serangkaian peristiwa itu. Sebagai pihak yang menjadi korban langsung dari kerusuhan belakangan ini, umat Kristiani layak menggugat. Tetapi siapa yang sepantasnya digugat? Bagaimana jika pelaku kerusuhan itu dan sponsornya belum cukup jelas? Atau sudah jelas tetapi terlalu kuat kekuasaannya untuk diganggu-gugat? Dengan konsekuensi dan modal apa para pemimpin umat Kristiani akan berani mengajukan tuntutan keadilan? Apakah selayaknya umat Kristiani hanya diam dan menerima nasib hidup sebagai kelompok minoritas? Apalagi bila disadari bahwa dirinya hanya dijadikan tumbal atau sasaran perantara, bukan musuh utama kaum perusuh itu.

Tetapi dengan berulang-ulang terjadinya pembakaran gereja hingga mencapai jumlah puluhan dalam satu tahun terakhir, tidak mungkin semua tragedi itu hanya ditelan mentah-mentah sebagai peristiwa “kebetulan” dan “nasib” malang. Persoalannya bukan lagi bagaimana harus mengungkit-ungkit peristiwa di masa lampau, tetapi bagaimana menyiapkan atau menghindari terjadinya kemungkinan lebih buruk di masa depan.

Jika ada yang boleh dibilang hikmah, maka salah satu hikmah yang ditawarkan serangkaian tragedi di tanah air ini kepada umat Kristiani adalah momentum untuk *merumuskan kembali peran sosialnya* di tengah masyarakat Indonesia yang sedang bergejolak saat ini.

Biar pun tidak ada yang bersyukur dengan terjadinya pembakaran puluhan gereja di beberapa kota di Jawa, suatu kondisi krisis merupakan masa ujian yang secara periodik diperlukan setiap orang bagi peneguhan dan penyegaran identitas sosialnya. Juga bagi kaum Kristiani yang terlalu lama mendapat posisi di-nina-bobokan baik oleh pimpinan umatnya mau pun lingkungan sosialnya. Kini cambuk dari luar itu terasa menyakitkan dan mengganggu tidur. Namun mungkin sudah saatnya umat Kristiani bangun dan lebih menyadari posisinya di tengah lingkungan sosialnya yang selama ini kurang menerima penggambarannya.

Secara ringkas, komunitas Kristiani kontemporer di Indonesia boleh dibilang sebagai sosok yang sangat konservatif dan pragmatis. Tentu saja ini bukan watak esensial Kristiani (apalagi tradisi Protestan). Bukan juga ajaran Kristiani. Tetapi secara sosiologis, begitulah sikap yang menonjol di sebagian besar komunitas Kristiani di Indonesia pada masa ini. Untuk memahami sejarah pembentukan watak mereka ini, sebuah tinjauan yang selintas sudah cukup mengingatkan kita akan beberapa pokok yang penting.

Tidak semua masyarakat menerima penyebaran agama Kristen dengan sejarah dan bentuk yang sama. Agama Kristen masuk ke tanah air ini lewat sejarah kolonialisme sebagai agama kaum penjajah. Tidak semua aparaturnya lebih kejam daripada aparaturnya negara nasional merdeka. Pendidikan dan penyebaran agama secara terbatas dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk jajahan. Tak jauh berbeda dengan apa yang sekarang dinamakan “pembangunan” di sejumlah negara berkembang. Bagaimana pun, watak konservatif komunitas Kristen telah berakar sejak awalnya di negeri ini.

Tonggak sejarah berikutnya yang terpenting adalah masa awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. Pada umumnya komunitas Kristiani selamat dalam banjir darah di tahun 1965-1966 dan pembersihan unsur-unsur revolusioner di tahun-tahun berikutnya karena mereka memang bukan unsur yang terlalu penting untuk diperhitungkan. Kebijakan pemerintah yang hanya mengakui lima agama resmi, ditambah praktek pembunuhan hak sipil terhadap mereka yang dituduh komunis, atheis, atau tidak ikut salah satu dari lima agama resmi, ikut membentuk sosok dan watak komunitas Kristiani yang paling penting hingga saat ini.

Banyak orang berbondong-bondong “masuk agama”, termasuk Kristen atau Katolik, karena tekanan politik (bukan karena kemerdekaan beribadah) di masa tersebut. Proses yang mirip tetapi dengan konsekuensi yang jauh lebih serius terjadi di Timor Timur sepuluh tahun kemudian. Dengan kata lain, bencana nasional 1965 membuat sejumlah agama resmi menjadi laris kebanjiran orang yang numpang tempat aman di dunia. Bahwa setelah masuk agama ini kemudian mereka mencari keselamatan surgawi itu merupakan masalah lain.

Pada seperempat abad pertama berkuasa, Orde Baru berambisi menjadi “negara integralistik” yang mengayomi semua unsur kekuatan sosial dan mengharmonisasikan oposisi. Terbukti komunitas Islam merupakan satu-satunya lingkungan sosial yang sangat besar dan luput dari kontrol negara Orde Baru. Selama masa panjang itu benturan politik di antara pimpinan negara Orde Baru dan komunitas Islam merupakan sejarah panjang yang sulit dihindari. Komunitas Kristiani bukan saja tidak pernah mengalami benturan semacam ini dengan negara Orde Baru, mereka bahkan menjadi sebagian penikmat hasil pembangunan yang sukses

dilancarkan pemerintah. Komunitas Kristiani tidak cukup penting untuk diganggu siapa pun. Sebaliknya mereka menempati posisi cukup nyaman sehingga tak merasa perlu mengganggu gugat siapa pun. Sikap dan posisi itu punya dampak serius pada masa-masa berikutnya.

Semuanya berubah sejak awal dekade 1990-an ini. Tiga kejadian penting telah merombak hubungan sosial Orde Baru seperempat abad terdahulu.

Pertama, berakhirnya Perang Dingin berarti kadaluwarsanya retorika “bahaya komunis” yang dulu mendorong masuknya orang Indonesia secara berbondong-bondong ke salah satu dari lima agama resmi. Sejak tahun 1990 Pemerintah Indonesia memperbaiki hubungan diplomatik dengan RRC. Kini pemerintah yang sama sibuk menanamkan modal ke negeri-negeri Indocina, sambil merangkul mereka masuk ASEAN. Padahal 30 tahun sebelumnya ASEAN didirikan dalam rangka permusuhan dengan negara-negara sosialis atau komunis itu. Runtuhnya “bahaya komunis” melemahkan logika “stabilitas keamanan” yang dipimpin oleh militer, salah satu aliansi terpenting pemerintahan Orde Baru.

Kedua, pada masa yang sama terjadi revolusi kapitalisme global. Bukan saja konglomerat Indonesia bermunculan di cakrawala dunia. Puluhan ribu remaja desa berhamburan ke berbagai pelosok global sebagai pekerja (TKI/TKW). Peran bisnis semakin merasuk ke panggung politik dan menggeser peran negara pada umumnya. Di dalam negeri peran pengusaha menggeser peran militer dalam politik kenegaraan. Di tengah berbagai gelombang perubahan sejarah dunia ini, tampaknya komunitas Kristen di Indonesia masih saja mirip dengan sosoknya di zaman kolonial.

Ketiga, restrukturisasi aliansi negara dan retaknya elit politik yang lama di pemerintahan mendorong pucuk pimpinan pemerintah untuk membina kerjasama baru tidak saja dengan pengusaha tetapi yang lebih penting adalah dengan komunitas Islam. Jika kaum pengusaha merupakan mitra terpenting dalam menghadapi globalisasi pasar kapitalisme, komunitas Islam menjadi sumber legitimasi politik dalam negeri. Legitimasi itu tidak dapat diberikan komunitas pengusaha karena mereka teraliansi dari mayoritas penduduk akibat perbedaan stempel agama (non-Islam), stempel etnik (non-pribumi), dan stempel kebangsaan (Jepang, Taiwan, Australia, Amerika, Jerman).

Transformasi yang sama menjelaskan mengapa retorika anti-Cina (anti non-pribumi) secara drastis merosot dan digantikan oleh kemesraan antar-etnik. Sejak tahun 1980-an kita tidak lagi menyaksikan kerusuhan yang “murni” anti-Cina seperti pada masa-masa sebelumnya, walau sisa-sisa sentimen anti-Cina masih belum lenyap, dan kerangka berpikir “anti-Cina” dalam ulasan pers masih sering mengelabui publik tentang sejumlah kerusuhan yang lebih berwatak konflik antar kelas sosial ketimbang rasial. Bukan saja jaringan pengusaha Cina semakin

dibutuhkan dalam persaingan kapitalisme global, tetapi juga konglomerat pribumi mulai bertumbuhan sejak awal dekade ini.

Kemesraan rasial antara elit yang mengklaim sebagai “pribumi” dan minoritas etnis Cina yang menguasai ekonomi nasional meninggalkan sebuah kekosongan wacana (anti-Cina) yang sebelumnya menjadi salah satu bahan perekat terbinanya masyarakat Orde Baru. Dalam waktu singkat kita menyaksikan bagaimana kekosongan yang strategis itu segera diisi oleh sesuatu yang sangat baru dalam sejarah Orde Baru, yakni wacana ketegangan antar-agama (sektarianisme). Dengan cepat komunitas agama yang minoritas telah dipilih untuk menggantikan peran yang dulu dimainkan oleh komunitas etnis minoritas: sebagai peran tumbal, atau sebagai kaum pariah dari segi politik.

Ada dua kebetulan sejarah yang perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan mengapa suksesi peran pariah itu berjalan secara mulus. Kebetulan pertama, banyak anggota dari etnis minoritas ini yang terdesak masuk menjadi anggota Jemaat Kristiani, sementara umat Kristiani belum tentu didominasi etnis minoritas tersebut. Kebetulan sejarah yang kedua, sudah berpuluh tahun baik minoritas etnis Cina mau pun minoritas agama Kristiani mempunyai watak konservatif dan pragmatis, jika bukan oportunistis. Dengan mendekap kompleksitas minoritas, mereka cenderung cari selamat dulu. Bila perlu menomor-duakan peran sosial yang diamanatkan oleh ajaran agama. Mereka membentuk lingkungan sendiri yang cenderung tertutup, dan menghindarkan diri dari masalah-masalah sosial yang kontroversial, apalagi yang melibatkan konfrontasi dengan penguasa.

Watak itu tampaknya jauh lebih parah di lingkungan komunitas Kristen Protestan ketimbang komunitas Katolik. Sampai sekarang komunitas Kristen Protestan tidak memiliki tokoh-tokoh profetis, intelektual atau aktivis sosial sekaliber Romo Mangunwijaya, Romo Sandyawan, Uskup Belo, George Junus Aditjondro. Tidak kebetulan bila sejumlah penerima anugerah perdamaian dan hak asasi dari Indonesia adalah pemeluk agama Katolik, bukan Kristen Protestan. Satu-satunya tokoh masyarakat beragama Kristen Protestan yang dapat disandingkan dengan tokoh-tokoh itu adalah Asmara Nababan. Kalau sejarah masyarakat Indonesia kontemporer menampilkan tokoh-tokoh idola remaja seperti Gus Dur, atau Megawati, sulit membayangkan tokoh-tokoh seperti itu akan bisa datang dari tokoh kunci komunitas Kristiani. Padahal sosok Yesus dan sepak terjangnya yang sangat galak dan kontroversial – juga Martin Luther 15 abad berikutnya – lebih banyak miripnya daripada lainnya dengan tokoh-tokoh yang disebutkan di atas.

Kebangkitan Kembali?

Sebagai penutup, saya akan mengangkat kembali sebuah kisah lain yang mengajarkan kepada kita semua betapa memprihatinkan kedudukan gereja dan umat Kristiani masa kini pada umumnya. Ini kisah runtuhnya sebuah lembaga pendidikan bernama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Tentu saja saya tidak akan membeberkan seluruh rincian peristiwa yang sangat rumit di lembaga yang pernah disegani itu.

Seperti dapat kita ikuti bersama lewat berbagai laporan media massa, kemelut di UKSW itu membelah warga kampus menjadi dua kubu. Di satu pihak sebagian terbesar *civitas academica* UKSW bergabung pada Kelompok Pro-Demokrasi. Mereka menentang bukan saja kepemimpinan rektoriat yang dibentuk secara kontroversial pada tahun 1993, tetapi juga menentang Pengurus Yayasan yang bertanggungjawab atas pembentukan rektoriat yang kontroversial itu. Tanpa mempersoalkan siapa yang benar atau salah di antara keduanya, dapat dikatakan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pihak yang lebih diharapkan untuk menjadi penengah selain para pemimpin gereja, khususnya gereja-gereja yang selama ini diakui semua pihak sebagai pendiri dan pendukung UKSW.

Namun apa yang terjadi? Bukan saja harapan itu sulit terpenuhi. Gereja tidak berani mengakui kelemahannya sendiri, sehingga tidak terus-menerus menebarkan harapan palsu di kalangan jemaat yang berharap mereka akan menjadi juru-damai. Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus wakil-wakil gereja-gereja yang mencoba berani ikut terlibat memecahkan kemelut serius di lembaga itu secara terang-terangan dilecehkan oleh mereka yang sedang merasa berhasil merebut kekuasaan di atas lembaga itu.

Salah satu mata-rantai dari kasus itu yang sangat memalukan adalah kasus pemecatan terhadap Dr. Arief Budiman. Walau pemecatan itu sulit dibenarkan dengan ukuran macam apa pun yang menggunakan akal sehat, pihak gereja tidak pernah cukup berani menyatakan sikap. Kemungkinan besar ketakutan bersikap itu bersumber dari prasangka bahwa Arief Budiman tidak disukai pemerintah karena suka mengkritik. Itu sebabnya dengan prasangka yang sama banyak pihak merasa yakin bahwa gugatan Arief Budiman di pengadilan akan dipatahkan para abdi negara. Buktinya, ternyata semua abdi negara yang bekerja di pengadilan itu jauh lebih berani daripada para pemimpin gereja yang tidak makan dari gaji pemerintah untuk menyatakan kebenaran. Seluruh gugatan Arief Budiman dibenarkan oleh vonis pengadilan. Hingga saat ini pun pihak UKSW tetap tidak mau mematuhi keputusan pengadilan. Dan gereja membisu seribu bahasa terhadap kasus itu.

Kasus kecil keruntuhan UKSW menggambarkan tidak sedikit, betapa seriusnya posisi dan kondisi umat Kristiani di Indonesia dalam proses transformasi

sosial-politik-ekonomi besar-besaran yang sedang berlangsung di Indonesia dan dunia. Keruntuhan UKSW sekaligus menunjukkan bahwa umat Kristiani tidak dapat sembarangan menunding pihak luar (entah itu agama lain yang lebih kuat, atau pemerintah) sebagai kambing hitamnya. Ini merupakan saat terbaik bagi umat Kristiani bercermin diri dan merumuskan kembali posisinya di tengah masyarakatnya. Sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa suatu semangat pembaharuan, pencerahan dan kasih muncul dan bangkit (kembali) setelah terjadinya sebuah kemarau panjang atau kekacauan yang berkepanjangan. Moga-moga kemarau panjang umat Kristiani (minimal di Indonesia) saat ini akan segera diakhiri oleh sebuah arus-balik yang lebih mendorong kebangkitan kembali kehidupan jasmani, rohani dan sosial komunitas Kristen *bersama-sama* dengan sesama makhluk ciptaan-Nya yang lain.□